

TAJUK RENCANA

'Siaga' Merapi di Antara Pilkada - Pandemi

PENGUMUMAN peningkatan status Gunung Merapi seakan menjadi terapi kejut warga DIY dan Jawa Tengah yang sedang dirongrong pandemi Covid-19. Pengumuman Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) itu seakan menyadarkan adanya ancaman lain yang juga harus dihadapi terlebih bagi sebagian masyarakat DIY dan Jawa Tengah.

Adalah fakta bila aktivitas vulkanik (kegempaan dan deformasi) Gunung Merapi saat ini terus meningkat. Menurut Kepala BPPTKG Hanik Humaida sejak Oktober lalu, kegempaan meningkat intensif. Data 4 November dengan rata-rata gempa vulkanik dangkal (VB) 29 kali / hari, fase banyak (MP) 272 kali / hari, guguran (RF) 57 kali / hari dan hembusan (DG) 64 kali / hari. Dan berdasarkan evaluasi data pemantauan, aktivitas Merapi saat ini dapat berlanjut erupsi yang membahayakan penduduk. Apalagi, sejak bulan Oktober 2020 kegempaan meningkat semakin intensif. Tak pelak, BPPTKG pun menaikkan status aktivitas Gunung Merapi dari 'Waspada' (level II) ke Siaga (level III). (KR. 6/11)

Bagi masyarakat dan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali, ancaman bencana tetap tidak bisa diabaikan. Meski selama ini mereka hidup damai dan bersahabat dengan Merapi namun ancaman erupsi dan lahar dinginnya sering menelan korban. Sekalipun di sisi lain, warga pun menikmati berkahnya. Tanah yang subur, kebersamaan yang erat, alam nan indah adalah sisi lain yang membuat mereka enggan meninggalkan wilayah tersebut.

Maka reaksi cepat pemerintah daerah yang tidak ingin kecolongan - pa-

ling tidak di empat wilayah tersebut di atas - pantas diapresiasi. Mulai penyiapan barak pengungsian, mengaktifkan pelatihan kesiagaan bencana sampai pemrioritasan proses evakuasi pengungsi dan lainnya. Bahkan KPU Boyolali mulai mengkaji pemungutan suara Pilkada 2020 di lokasi pengungsian. Karena di Kabupaten Boyolali ada 4 kecamatan yang rawan terkena dampak langsung ketika erupsi Merapi.

Sedia payung sebelum hujan, adalah kata bijak yang tak lekang oleh zaman. Apalagi seperti kata pakar kegununggunan Mbah Rono sepuluh tahun silam, *merapi tak pernah ingkar janji*. Semua tentu tidak ingin, kisah sejarah sepuluh tahun silam yang menyebabkan sedikitnya 353 korban termasuk Mbah Maridjan, itu berulang. Dan hanya dengan kesiagaan dan kerja sama antara pemerintah dan warga, korban itu bisa dihindarkan.

Tentu upaya kali ini sangat berbeda. Ada suasana yang berbeda kali ini. Di tengah pandemi Covid-19 penyiapan barak pengungsian juga harus memenuhi protokol kesehatan paling tidak soal jaga jarak. Di tengah kesiagaan menghadapi bencana Merapi ini juga akan diselenggarakan pilkada pada Desember mendatang.

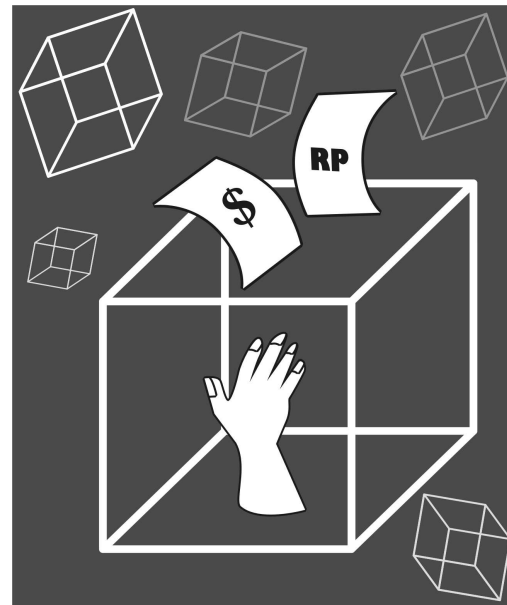
Namun lebih dari itu, sejatinya di sini lah masyarakat akan melihat siapa calon pemimpin sejati. Pemimpin yang tidak sekadar beretorika di panggung kampanye atau di arena debat calon. Bukankah tiga dari 4 daerah terdampak langsung yakni : Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali akan diselenggarakan pilkada? Apakah calon-calon kepala daerah dan wakilnya sigap mengantisipasi aneka bencana yang datang bersama? Kita lihat saja. □

Prioritas Mewujudkan Tertib Ruang

Sutaryono

Digitalisasi Melayani yang Profesional dan Terpercaya'. Tema tersebut menunjukkan semangat untuk mewujudkan tertib ruang melalui pelayanan digital secara profesional utamanya terkait dengan perizinan dalam pemanfaatan ruang.

Dalam aras perencanaan tata ruang, untuk kepentingan pemanfaatan ruang



bangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Indikasi program pemanfaatan ruang tersebut meliputi: (a) perwujudan rencana struktur ruang (pusat-pusat kegiatan dan jaringan sistem sarana prasarana); (b) perwujudan rencana pola ruang (program pembangunan Kawasan budidaya dan lindung); serta (c) perwujudan penetapan kawasan strategis yang mencakup program pembangunan untuk kepentingan ekonomi, sosial dan budaya serta untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup.

Dalam aras pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi empat instrumen, yakni peraturan zonasi, perizinan, pengenaan insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi, rielitasnya belum mengembirakan. Untuk mewujudkan tertib ruang melalui aras pengendalian perlu dilakukan: (a) penyediaan regulasi dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (b) RDTR dan PZ dijadikan *guidance* dalam perizinan dan pemanfaatan ruang; (c) perizinan harus ditempatkan sebagai instrumen pengendalian; (d) insentif dan disinsentif perlu diterapkan, baik untuk mendorong investasi maupun sebagai bagian dari pengendalian; dan (e) kebijakan penertiban pelanggaran tata ruang dilakukan melalui pengenaan sanksi.

Agenda-agenda inilah yang diharapkan menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tertib ruang. □

**) Dr. Sutaryono, Dosen pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Kuning Kelap Kelip

TRAFFIC Light di pertigaan UIN Sunan Kalijaga, Sleman, DIY, sekarang berubah. Lampu hijau menyala terus menerus bagi pengendara dari kota di Jalan Adisucipto ke arah Janti. Hal ini meningkatkan risiko bahaya bagi para pengendara dari arah Jalan Timoho yang akan menyeberang ke Jalan Pringwulung.

Kalau memang dapat dikembalikan

seperti semula, yaitu menyala merah bersamaan dengan saat penyeberangan ke Jalan Pringwulung, tentu jauh lebih aman. Namun demikian, kalau tidak mungkin kembali merah, lebih baik menyala kelap kelip kuning saja, agar para pengendara dari arah kota, menekan laju kendaraannya. □

**) Dr Fx Wikan Indrarto, Dokter Spesialis Anak RS Panti Rapih.*

Literasi Digital

PANDEMI Covid-19 mendorong proses digitalisasi yang sudah lama dipikirkan oleh berbagai kalangan. Virus Korona ini membuka mata banyak orang bahwa digitalisasi menjadi sebuah keharusan. Saat ini digital menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat apalagi guru. Pandemi Covid-19 menciptakan situasi baru dan membuat sistem pendidikan yang selama ini dijalankan. Pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka kini dilakukan secara daring. Hal ini mendorong perlunya kreativitas dan inovasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan pemenuhan hak dan kebutuhan pendidikan masyarakat atau siswa.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Guru memiliki peran yang strategis sebagai pengubah dalam pembangunan peradaban kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, pendidik harus berupaya menemukan solusi, strategi, dan menciptakan lingkungan belajar baru bagi siswa untuk memastikan pembelajaran dapat berlangsung di masa pandemi. Siap tidak siap

pandemi Covid-19 mengharuskan guru memanfaatkan teknologi sebagai upaya menjaga keberlangsungan pembelajaran.

Pada tahap awal, perpindahan menuju pembelajaran online di masa pandemi membutuhkan kemampuan inovasi dan kreativitas guru agar siswa tetap terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Para pendidik harus cepat beradaptasi dengan teknologi digital agar dapat memberikan materi pengajaran yang mudah dipahami oleh pelajar.

Guru harus terus berupaya memodifikasi pembelajaran dalam beraneka ragam sajian berbasis teknologi digital. Hal ini menjadikan literasi digital sebagai kompetensi wajib bagi pendidik di era pandemi. Literasi digital merupakan kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan mengatur berbagai perangkat teknologi untuk mende-sain pembelajaran di masa pandemi. Inilah kesempatan bagi pendidik untuk meningkatkan kompetensinya mengembangkan dan menciptakan pembelajaran yang tidak menjemukan bagi peserta didik. □

Suprapti, Guru SDN Kenaran 1 Prambanan, Sleman.

Solusi Konflik Lahan Tol

King Faisal Sulaiman

PEMBANGUNAN sarat dengan pembebasan tanah milik rakyat. Konflik tanah sudah pasti sulit untuk dihindari. Sekalipun terjadi dalam skala kecil. Lebih pelik lagi, jika dalam proses berjalannya pembangunan, turut campur kekuatan eksternal di luar masyarakat lokal. Yang tidak berkaitan secara langsung dengan pembangunan.

Sulit dipungkiri, kebijakan jalan tol menjadi prioritas bagi pemerintah sebagai katalisator proyek strategis nasional. Untuk tol yang menghubungkan Yogyakarta, kebutuhan lahan cukup signifikan. Statistik Pemda DIY menunjukkan, wilayah terdampak tol Jogja-Solo berkisar diangka 8,64 hektare. Meliputi kurang lebih, enam kecamatan dan 14 desa. Yang terpenting, kehadiran Tol Jogja, mampu memberikan *multiplier effect* bagi ekonomi rakyat dan pembangunan. Pembebasan lahan tidak boleh mengesampingkan fungsi sosial tanah. Negara wajib menjamin ganti kerugian yang layak bagi tanah warga yang terdampak.

Dua Model

Konsorsium Perbaruan Agraria (KPA) diawal 2020 mencatat sedikitnya ada 1.769 konflik agraria yang tersebar, termasuk sektor jalan tol. Pada prinsipnya semua jenis konflik agraria, merupakan akibat dari adanya penguasaan tanah yang mengabaikan prinsip kepentingan umum. Regulasi menyediakan solusi penyelesaian konflik tanah. Hanya saja paradigma penyelesaian sengketa perlu diubah.

Terdapat dua model cara penyelesaian sengketa tanah menurut UU No.2/2012. Mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Jalur litigasi dan non litigasi disediakan. Hanya saja masih tidak cukup. Titik berat penyelesaian sengketa tanah masih cenderung menggunakan pendekatan pengadilan. Baik secara keperdataan

ataupun berifat administrasi. Model penyelesaian, apabila terjadi sengketa pidana luput dari pengaturan. Padahal seringkali praktik ganti kerugian, terdapat unsur pererasan, atau penyalahgunaan wewenang.

Ironisnya, warga terdampak yang keberatan dengan besaran ganti kerugian tidak memiliki ruang musyawarah yang cukup dengan tim appraisal-pemerintah. Pemerintah cukup menitipkan besaran uang ganti rugi tersebut di pengadilan setempat. Warga diminta datang untuk mengambarnya. Asalkan sudah melampui 14 hari. Dan secara otomatis, pemegang hak milik atas tanah dianggap telah menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian tersebut.

Kearifan Lokal

Hukum haruslah bermoral dan beretika. Regulasi harus mampu menghadirkan tertib sosial dalam masyarakat. Termasuk, keselamatan, dan kesejahteraan rakyat. Bagi warga yang masih kuat nilai kearifan lokal, semua konflik

bisa diselesaikan secara damai dan tanpa kisruh. Asalkan, para tetua adat dan pemuka masyarakat dilibatkan secara penuh. Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi atau *Alternatif Dispute of Resolution* (ADR) tidak boleh diabaikan.

Model seperti forum 'Rembuk Desa' bisa menjadi pilihan ideal. Mewakili perspektif kerakyatan yang bersifat tradisional dengan hukum adat yang masih berlaku. Model ini sangat rasional dan dapat diandalkan. Terkait masa depan skema penyele-

saian konflik agraria. Di awali dengan musyawarah untuk mufakat. Kemudian proses negosiasi dan terakhir adalah proses mediasi.

Kesemuaan proses ini, selain melibatkan para pihak yang bersengketa. Wajib pula melibatkan para tokoh agama, para tokoh adat. Termasuk pula, pemuka masyarakat, perwakilan pemuda kampung. Mereka lazim merupakan *problem solver* setiap konflik yang dihadapi masyarakat. Sikap, ketokohan, nasehat atau keteladanan mereka dalam konteks relasi sosial-kemasyarakatan, lebih didengar.

Nasehat dan argumentasi para stakeholder sosial ini lebih efektif dalam menyelesaikan konflik. Daripada pendekatan institusi negara. Yang sarat cara formal seperti pengadilan dan ancaman sanksi hukum positif. Penyelesaian konflik tanah secara non litigasi/ADR, perlu diantisipasi sejak dini. Berbasis nilai kearifan lokal sebagai *rule of model*. □

**) Dr King Faisal Sulaiman SH LLM, Peneliti PK2P UMY, Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan UMY*

Pojok KR

Status Merapi jadi 'Siaga'
-- Jangan berkiprah di tempat berbahaya ***

Pandemi, omzet tanaman hias naik 90%
-- Selalu ada berkah dibalik musibah ***

Jumlah pengangguran naik 2,56 juta
-- Belum lagi pengangguran tersamar

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuruya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grufas:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijnarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.